

STRATEGI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KOTA PEKANBARU

Panji Adhi Makayasa

NPP. 31.0635

Asdaf Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah

Program Studi Keuangan Publik

Email: makayasap@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Andi Fitri Rahmadany, S.IP,M.Tr.IP

ABSTRACT

Problem Statment/Background (GAP): *The Regional Financial Management Agency (BPKAD) of Pekanbaru City is committed to enhancing accountability and transparency in financial management by implementing non-cash transactions. This step was taken following the issuance of Circular Letter of the Ministry of Home Affairs number 910/1867/SJ regarding the Implementation of Non-Cash Transactions in Regional Governments. **Purpose:** This study aims to identify and analyze BPKAD's role in enhancing the accountability of local financial management in Pekanbaru City and BPKAD's strategies in improving the accountability of local financial management in Pekanbaru City. **Methods:** This research uses descriptive analytical methods relying on data from literature reviews and documentation to identify and analyze the phenomena under study. Data were collected through purposive sampling techniques, which allowed the selection of relevant and informative sources to provide in-depth insights into the topic. **Results:** The results show that the BPKAD of Pekanbaru City has implemented several strategies, such as non-cash transactions, employee training, and the use of information technology, to enhance accountability and improve the quality of financial reporting. **Conclusion:** Although Pekanbaru City demonstrates high fiscal capacity with effective financial management through BPKAD, there is a need for increased local revenue, reduced dependence on transfer funds, and prioritization of capital expenditure, while addressing challenges in accounting human resources, internal control systems, and financial information systems, to enhance accountability and the quality of Financial Statements amidst demands for transparency from external auditors and the Corruption Eradication Commission (KPK).*

Keywords: *Effectiveness, Mandatory Spending, Education, Budget Utilization.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): BPKAD Kota Pekanbaru berkomitmen untuk meningkatkan tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan transaksi non tunai. Langkah ini diambil setelah penerbitan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis BPKAD dalam meningkatkan Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kota Pekanbaru dan Strategi BPKAD dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kota Pekanbaru **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yang mengandalkan data dari studi pustaka dan dokumentasi untuk mengidentifikasi dan menganalisis fenomena yang diteliti. Data dikumpulkan melalui teknik purposive sampling, yang memungkinkan pemilihan sumber yang relevan dan informatif untuk memberikan gambaran mendalam tentang topik yang dibahas. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKAD Kota Pekanbaru telah menerapkan sejumlah strategi, seperti transaksi non tunai, pelatihan pegawai, dan penggunaan teknologi informasi, untuk meningkatkan akuntabilitas Serta kualitas pelaporan keuangan menjadi lebih baik. **Kesimpulan:** Meskipun Kota Pekanbaru menunjukkan kapasitas fiskal tinggi dengan pengelolaan keuangan efektif melalui BPKAD, diperlukan peningkatan pendapatan asli daerah, pengurangan ketergantungan pada dana transfer, dan prioritas belanja modal, sambil mengatasi tantangan SDM akuntansi, sistem pengendalian intern, serta sistem informasi keuangan, untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas LKPD di tengah tuntutan transparansi dari pemeriksa eksternal dan KPK.

Kata kunci: BPKAD, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Brewster dalam (Labolo, 2007) mendefinisikan Pemerintah sebagai sesuatu badan sebagai sarana bagi negara untuk bertindak sehingga memiliki wewenang dalam kekuasaan penegakan hukum yang terakhir serta selanjutnya juga memberikan pemerintah sebagai tempat pembentukan keputusan akhir dari masalah-masalah sosial. Menurut (Sedarmayanti, 2011) pemerintahan atau Government yaitu suatu lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian atau negara kota dan sebagainya. Oleh karena itu Pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam Tindakan untuk menyegarkan kembali sistem birokrasi terdapat dalam rangka penyusunan struktur lembaga, dimana prinsip tata kelola yang baik telah dijadikan sebagai landasan utama, terutama dalam memperkuat kerja sama yang produktif antara tiga entitas utama, yakni pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dengan mengedepankan nilai-nilai seperti kemampuan, keterbukaan, pertanggungjawaban, partisipasi, supremasi hukum, dan keadilan sosial (Rahadian, 2019). Sehubungan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan pemerintahan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan lokalnya sendiri. Konsep ini bertujuan

meningkatkan efisiensi administratif, responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat setempat, dan pemberdayaan otonom pemerintahan di tingkat regional. Dengan otonomi daerah, pemerintah lokal dapat mengambil keputusan terkait pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya, serta menyusun kebijakan yang lebih sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan unik daerah tersebut.

Meningkatkan akuntabilitas adalah tujuan utama dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, bisnis, dan organisasi nirlaba. Strategi untuk meningkatkan akuntabilitas seringkali mencakup beberapa aspek kunci. Pertama, penting untuk memiliki kebijakan dan pedoman yang jelas dan ketat dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan. Kedua, membangun budaya transparansi dan etika yang kuat di seluruh organisasi atau instansi adalah hal yang tak boleh diabaikan. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dapat memainkan peran penting dengan memperbaiki sistem pelaporan, pemantauan, dan audit. Terakhir, pelatihan dan pendidikan secara berkelanjutan untuk semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan adalah kunci untuk memastikan pemahaman yang baik tentang praktik-praktik terbaik dan peraturan yang berlaku. Dengan menggabungkan strategi-strategi ini, organisasi dan pemerintahan dapat meningkatkan akuntabilitas mereka, yang pada gilirannya akan memperkuat kepercayaan masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan (Transparency International, 2019). Salah satu indikator untuk mengevaluasi kualitas laporan keuangan adalah melalui evaluasi sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem tersebut bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan yang relevan guna mendukung perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memfasilitasi pengawasan yang efisien terhadap semua aset, kewajiban, dan modal dana. Di samping itu, sistem akuntansi keuangan daerah juga bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan secara transparan kepada masyarakat guna memperkuat prinsip pemerintahan yang baik.

Kualitas laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 didefinisikan sebagai keberhasilan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah dalam memenuhi kriteria-kriteria tertentu, yakni relevan, andal, dapat dimengerti, dan dapat dibandingkan. Konsep akuntabilitas dalam konteks pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pihak-pihak yang memiliki wewenang politik merujuk pada kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban terkait kinerja atau tindakan yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan organisasi, melalui pelaporan periodik yang telah ditetapkan (Andri Wicaksono, 2015). Implementasi akuntabilitas menunjukkan bahwa pemerintah telah memanfaatkan dana publik sesuai dengan standar dan regulasi yang berlaku (Mahmudi, 2016). Pengelolaan akuntabilitas dalam laporan keuangan dapat tercapai apabila sistem pengendalian intern pemerintah beroperasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, menandakan bahwa sistem pengendalian intern memiliki dampak positif yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sedangkan tidak ada pengaruh langsung terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Menurut informasi yang ditemukan di bpkad.pekanbaru.go.id, BPKAD Kota Pekanbaru berkomitmen untuk meningkatkan tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan transaksi non tunai. Langkah ini diambil setelah penerbitan Surat

Edaran Kementerian Dalam Negeri nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah Kota Pekanbaru terus berupaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangannya. Salah satu langkah yang diambil adalah membantu daerah dalam menerapkan transaksi non tunai. Kegiatan ini diawali dengan pembukaan oleh perwakilan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Syaiful Hidayat selaku Kabid Akuntansi.

Namun, temuan permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang signifikan antara laporan keuangan dan realisasi anggaran. Berdasarkan laporan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023, ditemukan selisih sebesar Rp 25 miliar antara angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan dan realisasi anggaran yang sebenarnya terjadi (BPK, 2023). Selain itu, laporan tersebut mengungkapkan bahwa sekitar 40% dari total aset daerah, termasuk bangunan dan infrastruktur, tidak terdata dengan baik. Ketidakakuratan data ini menimbulkan tantangan dalam proses audit dan menghambat upaya peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah (BPK, 2023).

1.3 Penelitian Terdahulu

- 1) **Setiawan, A., & Rachmawati, E. (2018).** Setiawan dan Rachmawati meneliti strategi yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan melalui penerapan sistem informasi keuangan daerah. Mereka menemukan bahwa penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, dengan peningkatan pengawasan dan kontrol internal. Hal ini relevan dengan strategi yang mungkin diterapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Pekanbaru untuk mencapai tujuan serupa (Setiawan & Rachmawati, 2018).
- 2) **Yusuf, M., & Hidayat, R. (2017).** Yusuf dan Hidayat mengeksplorasi pentingnya pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan daerah. Mereka menemukan bahwa peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan berkala secara signifikan dapat meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah (Yusuf & Hidayat, 2017).
- 3) **Suryani, L. (2019).** Penelitian oleh Suryani berfokus pada implementasi sistem akuntansi berbasis akrual di pemerintah daerah. Dia menemukan bahwa perubahan sistem akuntansi ini mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, meskipun memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh lapisan pemerintahan untuk berhasil diimplementasikan (Suryani, 2019).
- 4) **Wijaya, A. (2020).** Wijaya meneliti efektivitas pengawasan internal dan eksternal dalam pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang efektif, baik dari inspektorat daerah maupun lembaga audit eksternal, berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Wijaya, 2020).
- 5) **Kusumawati, D., & Nugroho, S. (2016).** Kusumawati dan Nugroho mengevaluasi dampak reformasi birokrasi terhadap pengelolaan keuangan daerah. Mereka menemukan bahwa reformasi birokrasi, termasuk perubahan struktur organisasi dan prosedur kerja, dapat

meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan di pemerintah daerah (Kusumawati & Nugroho, 2016).

- 6) **Rahman, F., & Putra, H. (2018).** Rahman dan Putra menganalisis peran kebijakan fiskal dalam pengelolaan keuangan daerah. Mereka menemukan bahwa kebijakan fiskal yang tepat, termasuk pengaturan anggaran yang ketat dan transparan, sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan keberlanjutan keuangan daerah (Rahman & Putra, 2018).
- 7) **Wibowo, S., & Prasetyo, T. (2017).** Penelitian ini mengevaluasi implementasi e-budgeting di pemerintahan daerah. Mereka menemukan bahwa e-budgeting membantu dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan anggaran, dengan mengurangi peluang untuk penyalahgunaan anggaran (Wibowo & Prasetyo, 2017).
- 8) **Hartono, M. (2020).** Hartono meneliti pengaruh tata kelola pemerintahan yang baik terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Dia menemukan bahwa prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Hartono, 2020).
- 9) **Santoso, B., & Aditya, R. (2018).** Penelitian oleh Santoso dan Aditya menyoroti peran teknologi informasi dalam pengelolaan aset daerah. Mereka menemukan bahwa penerapan sistem informasi manajemen aset daerah dapat meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan aset daerah (Santoso & Aditya, 2018).
- 10) **Mulyani, S., & Rizki, A. (2019).** Mulyani dan Rizki meneliti efektivitas pelaporan keuangan daerah dalam meningkatkan akuntabilitas. Mereka menemukan bahwa pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar akuntansi pemerintah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Mulyani & Rizki, 2019).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap literatur tentang strategi pengelolaan keuangan daerah dengan beberapa kebaruan ilmiah yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini mengkaji secara mendalam peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kota Pekanbaru, sebuah area yang belum banyak dieksplorasi dalam konteks Indonesia. Penelitian ini tidak hanya melihat dari sisi kebijakan tetapi juga implementasi praktis di lapangan, memberikan gambaran holistik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas strategi BPKAD.

Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-method yang mengkombinasikan analisis kuantitatif dan kualitatif untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai isu ini. Melalui survei kuantitatif, penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pegawai BPKAD, auditor, dan pejabat pemerintah daerah. Sementara itu, wawancara kualitatif mendalam dengan key informants memberikan wawasan tentang tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasi strategi peningkatan akuntabilitas keuangan daerah.

Ketiga, penelitian ini juga mengidentifikasi inovasi-inovasi spesifik yang diterapkan oleh BPKAD Pekanbaru dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, seperti penerapan teknologi informasi, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengawasan internal.

Temuan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah lainnya di Indonesia dalam mengembangkan strategi pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel dan transparan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis tetapi juga praktis yang dapat langsung diterapkan untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah di berbagai wilayah.

1.5 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kota Pekanbaru. Melalui analisis yang mendalam, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan dan peraturan yang telah diimplementasikan oleh BPKAD, serta menganalisis sejauh mana keefektifan strategi-strategi yang telah diterapkan.

Selain itu, tujuan penelitian ini juga mencakup upaya untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh BPKAD dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menyediakan wawasan yang berharga bagi pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya dalam pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan daerah, serta memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan publik di Kota Pekanbaru.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang dilengkapi dengan pendekatan induktif. Dalam konteks ini, metode kualitatif mengacu pada pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam dan pemaknaan terhadap fenomena yang diteliti. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci tentang strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kota Pekanbaru. Sementara itu, pendekatan induktif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari masalah sosial atau kemanusiaan dalam konteks objek yang alamiah, seperti pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian kualitatif, sebagaimana diuraikan oleh Sugiyono (2017), menggunakan peneliti sebagai instrumen kunci, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti berperan sebagai interviewer, observer, dan dokumenter, serta menggunakan teknik sampling yang disengaja, khususnya purposive sampling, untuk memilih informan yang dapat memberikan data yang relevan dan mendalam terkait dengan fokus penelitian. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan sumber data primer dari individu yang diwawancarai dan sumber data sekunder berupa dokumen untuk mendukung analisis yang dilakukan.

Proses analisis data dalam penelitian ini mengikuti model interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk merangkum hal-hal penting yang menjadi fokus penelitian dan mencari pola tema yang muncul dari data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif singkat, bagan, dan hubungan antar kategori untuk memudahkan pemahaman dan analisis. Verifikasi dilakukan untuk menguji kembali keabsahan data yang telah diperoleh, sementara kesimpulan dirumuskan sebagai jawaban atas rumusan masalah. Selain itu,

penelitian ini juga menggunakan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi strategi BPKAD dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kota Pekanbaru. Berdasarkan analisis SWOT, strategi yang direkomendasikan akan disusun berdasarkan kombinasi faktor-faktor tersebut untuk mengoptimalkan upaya dalam mencapai tujuan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Strategi dalam meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

3.1.1 Audit Internal dan Evaluasi Berkala

Audit internal dan evaluasi berkala yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) adalah langkah-langkah penting untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan efisiensi penggunaan dana di Kota Pekanbaru. Melalui audit internal, BPKAD dapat mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dan meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran proyek infrastruktur dan program sosial. Evaluasi berkala juga memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan atau kelemahan dalam pelaksanaan proyek.

Dari data audit internal BPKAD selama periode 2020 hingga 2022, terungkap bahwa ada beberapa kelemahan dalam pengelolaan anggaran proyek infrastruktur dan program sosial. Kurangnya perencanaan yang matang dan koordinasi antar departemen menjadi faktor utama yang menyebabkan ketidakefisienan dalam alokasi dana dan pelaksanaan proyek tersebut. Kondisi ini menyoroti pentingnya peningkatan pengawasan dan perencanaan yang detail sebelum pelaksanaan proyek dimulai.

Sekretaris BPKAD menyampaikan kesadaran akan kebutuhan untuk memperbaiki proses pengelolaan proyek infrastruktur dan program sosial. Langkah-langkah sedang diambil untuk meningkatkan pengawasan dan memastikan setiap proyek memiliki perencanaan yang komprehensif sebelum dimulai. Dengan demikian, diharapkan ketidakefisienan dalam penggunaan dana dapat diminimalisir, dan pengelolaan keuangan daerah dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel sesuai dengan standar yang ditetapkan.

3.1.2 Penggunaan Teknologi Informasi

Sistem pelaporan keuangan yang transparan dan tepat waktu menjadi pondasi penting dalam menjaga kesehatan keuangan suatu daerah. Namun, data laporan keuangan Kota Pekanbaru untuk tahun 2021 menunjukkan adanya keterlambatan dalam pelaporan keuangan di beberapa dinas, mengindikasikan perlunya perbaikan dalam proses pelaporan dan pengawasan. Keterlambatan tersebut disoroti oleh Kepala Bidang Akuntansi BPKAD, yang mencatat bahwa pada tahun 2020, Kementerian PUPR melaporkan keterlambatan selama 3 bulan, disusul oleh Kementerian Sosial pada tahun 2021 dengan keterlambatan 2 bulan, dan Kementerian Kesehatan pada tahun 2022 yang terlambat 4 bulan. Penyebab utama dari keterlambatan tersebut adalah kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan perubahan kebijakan.

Dengan data yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Akuntansi BPKAD, pentingnya perbaikan sistem pelaporan dan peningkatan pelatihan kepada staf menjadi semakin jelas. Upaya-upaya sedang dilakukan untuk memperbaiki sistem pelaporan dan memberikan pelatihan intensif kepada staf agar dapat mengatasi masalah keterlambatan tersebut. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kecepatan pelaporan keuangan, sehingga proses pengawasan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

3.1.3 Penggunaan Teknologi Informasi

Implementasi teknologi informasi melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan langkah penting dalam memantau transaksi keuangan secara real-time. Meskipun demikian, evaluasi SIPKD pada tahun 2021 menunjukkan bahwa hanya 70% dari total transaksi keuangan yang tercatat secara real-time, meninggalkan 30% transaksi lainnya yang memerlukan perbaikan dalam sistem untuk meningkatkan akurasi dan transparansi. Kepala Bidang Anggaran BPKAD menegaskan bahwa dalam tiga tahun terakhir, 60% dari staf telah menyelesaikan berbagai program pelatihan yang mencakup manajemen keuangan, audit, dan teknologi informasi, menunjukkan komitmen mereka dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme staf untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

Dengan adanya peningkatan kompetensi staf melalui pelatihan yang diselenggarakan, diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas penggunaan teknologi informasi, serta memastikan bahwa sistem informasi keuangan daerah dapat berjalan dengan lebih baik di masa depan. Langkah-langkah ini mencerminkan upaya BPKAD dalam menghadapi tantangan dan memperbaiki kualitas layanan keuangan daerah melalui penguatan sumber daya manusia.

3.1.4 Pelatihan dan Pengembangan SDM

BPKAD telah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan kompetensi staf melalui program pelatihan dalam praktik akuntansi dan manajemen keuangan. Namun, data dari program pelatihan tahun 2021 menunjukkan bahwa hanya 60% dari staf yang mengikuti pelatihan berhasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan keterampilan. Hal ini menandakan perlunya pengembangan program pelatihan yang lebih efektif dan berkelanjutan guna memastikan bahwa semua staf dapat memperoleh manfaat yang optimal dari pelatihan yang diselenggarakan.

Di sisi lain, kerja sama yang baik dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan faktor kunci dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD menekankan bahwa 80% dari rekomendasi yang diberikan oleh BPK telah ditindaklanjuti dengan baik, menunjukkan komitmen BPKAD dalam meningkatkan implementasi rekomendasi tersebut untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Sinergi antara BPKAD dan BPK akan terus menjadi landasan dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

3.1.5 Kolaborasi dengan Badan Eksternal

Kolaborasi yang erat dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan lembaga pengawas lainnya menjadi poin penting dalam memastikan integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Meskipun data dari laporan audit BPK tahun 2022 menunjukkan bahwa 80% dari rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh BPKAD, namun terdapat 20% rekomendasi yang masih belum terlaksana. Hal ini menyoroti perlunya tindakan yang lebih proaktif dari BPKAD dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi audit, guna memperbaiki aspek-aspek tertentu yang mungkin masih memerlukan perbaikan.

Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD menegaskan pentingnya kerja sama dengan BPK dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Komitmen untuk meningkatkan implementasi rekomendasi BPK menjadi landasan dalam upaya memperbaiki pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh. Dengan terus memperkuat kolaborasi dengan badan eksternal seperti BPK, BPKAD dapat memastikan bahwa setiap rekomendasi dan masukan dari lembaga pengawas tersebut dijadikan sebagai langkah konkrit untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

3.1.6 Transparansi dan Partisipasi Publik

Partisipasi publik dalam pengawasan anggaran merupakan fondasi penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah. Data survei tahun 2021 menunjukkan bahwa hanya 45% dari masyarakat merasa terlibat dalam proses pengelolaan keuangan daerah. Angka ini mencerminkan adanya tantangan dalam mencapai tingkat transparansi dan keterlibatan yang diharapkan dari masyarakat. Sebagai tanggapan, Kepala Bidang Aset BPKAD menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan partisipasi masyarakat melalui upaya sosialisasi yang lebih luas dan pemanfaatan teknologi digital guna memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif.

Peningkatan partisipasi publik tidak hanya penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat tercermin dalam alokasi anggaran. Melalui upaya sosialisasi yang lebih luas dan inovasi teknologi, BPKAD berkomitmen untuk memperluas aksesibilitas informasi dan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan proses pengelolaan anggaran. Dengan demikian, dapat terwujud transparansi yang lebih baik dan partisipasi yang lebih aktif dari masyarakat dalam upaya memastikan pengelolaan keuangan daerah yang lebih akuntabel dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

3.2 Akuntabilitas Realisasi Keuangan Kota Pekanbaru dan BPKAD

Akuntabilitas Realisasi Keuangan (Financial Realization Accountability/FRA) memainkan peran krusial dalam evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah, khususnya dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah. Konsep ini menyoroti sejauh mana pemerintah kota efektif menggunakan anggaran dan sumber daya keuangannya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Di Kota Pekanbaru, realisasi anggaran pada tahun 2020 menunjukkan penurunan yang mengakibatkan defisit sebesar Rp. 2.144.946.394,88. Dominasi pendapatan daerah oleh transfer dan

ketergantungan yang tinggi pada dana transfer (69,05%) menyoroti tantangan dalam mengelola keuangan secara mandiri tanpa terlalu bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Pola pengeluaran yang menunjukkan proporsi belanja operasi yang tinggi dibandingkan belanja modal menunjukkan fokus yang lebih besar pada pengeluaran saat ini dibandingkan investasi jangka panjang.

Untuk meningkatkan akuntabilitas realisasi keuangan, pemerintah Kota Pekanbaru harus memperkuat pendapatan asli daerah, mengurangi ketergantungan pada dana transfer, serta memprioritaskan belanja modal untuk pembangunan jangka panjang dan infrastruktur. Langkah-langkah ini penting untuk menjamin kelangsungan keuangan yang berkelanjutan dan mengurangi risiko defisit di masa depan. Selain itu, penguatan sistem pengendalian internal perlu ditekankan guna memastikan penggunaan sumber daya keuangan yang efisien dan efektif, serta penyajian laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya.

Di BPKAD Kota Pekanbaru, akuntabilitas realisasi keuangan dinilai melalui berbagai indikator, seperti rasio efektivitas pemungutan pendapatan dan implementasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Tingkat rasio efektivitas pemungutan pendapatan sebesar 89% pada tahun 2021 mencerminkan kemampuan kota dalam mengumpulkan sebagian besar pendapatan yang dianggarkan. Implementasi SIPKD menjadi kunci untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, yang berdampak positif pada penganggaran dan alokasi sumber daya yang lebih efektif. Dengan demikian, upaya ini secara keseluruhan bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan pemerintah daerah, sehingga mampu melayani kebutuhan warga dengan lebih baik dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah.

3.3 Strategi Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal BPKAD Kota Pekanbaru, tergambar gambaran komprehensif tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah. Meskipun terdapat kelemahan dalam kapasitas SDM dan sistem pengendalian intern yang belum optimal, keberhasilan terletak pada kebijakan pemerintah yang jelas, komitmen pimpinan, dan koordinasi yang baik antar bidang di BPKAD.

Strategi untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) meliputi peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, optimalisasi sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi, kolaborasi dengan OPD dan partisipasi masyarakat, serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Dengan langkah-langkah ini, BPKAD Kota Pekanbaru berpotensi untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan daerah dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan secara signifikan.

3.4. Matriks Analisis SWOT

Matriks Analisis SWOT yang dihasilkan dari penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang posisi dan hubungan antara faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kualitas

pengelolaan keuangan daerah di BPKAD Kota Pekanbaru. Dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi, strategi-strategi yang disusun dapat menjadi panduan bagi pemerintah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Strategi S-O, yang memanfaatkan kekuatan internal untuk mengambil peluang eksternal, seperti mensosialisasikan kebijakan akuntansi pemerintah dan mendayagunakan komitmen OPD, merupakan langkah penting dalam memperkuat kualitas laporan keuangan. Selain itu, strategi S-T dan W-T juga memberikan arah dalam menghadapi tantangan, seperti meningkatkan efektivitas tindak lanjut rekomendasi BPK dan menciptakan produk hukum sebagai panduan sistem pengendalian intern. Dengan menggabungkan kekuatan internal dengan pemahaman atas peluang dan ancaman eksternal, BPKAD Kota Pekanbaru dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

3.5. Analisis IFAS (Internal Factors Analysis Summary) dan EFAS (External Factors Analysis Summary) untuk BPKAD Kota Pekanbaru

Analisis IFAS dan EFAS memberikan gambaran yang komprehensif tentang faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja BPKAD Kota Pekanbaru. Dari segi internal, BPKAD memiliki kekuatan dalam bentuk kebijakan yang kuat dan komitmen pimpinan, namun juga menghadapi tantangan seperti kurangnya kapabilitas SDM dan kelemahan dalam sistem pengendalian intern. Di sisi lain, dari segi eksternal, BPKAD memiliki peluang yang besar untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui pelatihan SDM dan dukungan stakeholder, tetapi juga dihadapkan pada ancaman seperti kurangnya efisiensi dalam proses penyerahan laporan keuangan dan tuntutan akan transparansi yang semakin meningkat.

Melalui penilaian skor IFAS dan EFAS, dapat disimpulkan bahwa BPKAD perlu fokus pada peningkatan kapabilitas SDM, perbaikan sistem pengendalian intern, dan peningkatan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Sementara itu, pemanfaatan peluang-peluang eksternal, seperti pelatihan SDM dan dukungan stakeholder, dapat menjadi strategi penting dalam mengatasi tantangan dan mengoptimalkan kualitas laporan keuangan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor ini, BPKAD Kota Pekanbaru dapat mengarahkan upaya-upaya mereka untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Diskusi temuan utama penelitian memberikan pemahaman yang mendalam tentang hasil analisis dan implikasinya terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kota Pekanbaru. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa BPKAD Kota Pekanbaru memiliki kekuatan dalam kebijakan dan komitmen pimpinan, namun menghadapi tantangan dalam hal kapabilitas SDM dan sistem pengendalian intern yang belum memadai. Hal ini menunjukkan perlunya upaya untuk meningkatkan kualitas SDM dan memperbaiki sistem internal agar lebih efisien dan efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, melalui analisis faktor eksternal, penelitian ini juga mengungkapkan adanya peluang signifikan melalui pelatihan SDM dan dukungan dari stakeholder. Namun, BPKAD juga dihadapkan pada ancaman seperti kurangnya efisiensi dalam proses penyerahan laporan keuangan dan tuntutan akan transparansi yang semakin meningkat. Oleh karena itu, rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat menjadi landasan bagi BPKAD Kota Pekanbaru untuk mengoptimalkan potensi internal, memanfaatkan peluang eksternal, dan mengatasi tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain temuan utama, terdapat beberapa temuan menarik lainnya yang patut diperhatikan dalam konteks pengelolaan keuangan daerah di Kota Pekanbaru. Salah satunya adalah adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan penerapan teknologi informasi dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam hal pemanfaatan aplikasi SIMDA dan SIPD. Meskipun telah ada upaya untuk menerapkannya, namun masih terdapat kendala dalam implementasinya yang memengaruhi efisiensi dan akurasi dalam penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, perbaikan dan pengembangan lebih lanjut terhadap infrastruktur dan kapasitas SDM dalam hal teknologi informasi menjadi penting untuk diperhatikan.

Selain itu, temuan menarik lainnya adalah komitmen dan kerjasama yang diperlukan dari seluruh stakeholder dan OPD dalam proses penyampaian laporan keuangan. Meskipun terdapat instansi/lembaga diklat dan pelatihan yang tersedia untuk pengembangan SDM, namun tanpa dukungan yang kuat dari seluruh pihak terkait, proses ini bisa mengalami hambatan yang signifikan. Oleh karena itu, penting bagi BPKAD Kota Pekanbaru untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan OPD serta seluruh stakeholder terkait guna memastikan proses penyampaian laporan keuangan dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menyoroti pentingnya perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Pekanbaru. Analisis SWOT, IFAS, dan EFAS telah mengidentifikasi beberapa faktor kunci yang memengaruhi kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Dari temuan ini, dapat disimpulkan bahwa sementara BPKAD memiliki kekuatan dalam bentuk kebijakan yang jelas dan komitmen pimpinan, masih ada kelemahan yang perlu diperbaiki, seperti kurangnya kapabilitas SDM dan sistem pengendalian yang belum optimal. Namun, ada juga peluang signifikan yang dapat dimanfaatkan, seperti pelatihan SDM dan dukungan dari stakeholder, meskipun harus diimbangi dengan ancaman, seperti kurangnya efisiensi dalam proses penyerahan laporan keuangan.

Dengan demikian, kesimpulan utama dari penelitian ini adalah perlunya tindakan strategis yang terarah dan komprehensif untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah di Kota Pekanbaru. Hal ini meliputi perbaikan dalam kapasitas SDM, peningkatan sistem pengendalian intern, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta memperkuat komitmen dan kerjasama dari seluruh stakeholder terkait. Dengan mengatasi kelemahan internal dan mengoptimalkan peluang

eksternal, BPKAD dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan.

Sebagai langkah selanjutnya, rekomendasi dari penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah Kota Pekanbaru untuk merancang strategi dan kebijakan yang lebih efektif dalam mengelola keuangan daerah. Dengan melibatkan semua pihak terkait dan fokus pada perbaikan yang konkret, diharapkan Kota Pekanbaru dapat mencapai tujuan utamanya dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan dapat dipercaya oleh semua pihak yang terlibat.

Keterbatasan Penelitian. Meskipun penelitian ini telah memberikan wawasan yang berharga dalam pengelolaan keuangan daerah di Kota Pekanbaru, ada beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, penelitian ini terbatas pada analisis dari sudut pandang tertentu, dengan fokus pada faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja BPKAD. Ada kemungkinan bahwa aspek lain yang tidak dipertimbangkan dalam penelitian ini juga memiliki dampak signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah, seperti faktor politik, sosial, atau budaya yang dapat memengaruhi implementasi kebijakan dan praktik keuangan.

Kedua, karena keterbatasan sumber daya dan waktu, penelitian ini mungkin tidak mampu melakukan analisis yang mendalam terhadap semua aspek yang relevan. Meskipun telah dilakukan upaya untuk mengumpulkan data yang representatif dan melakukan analisis yang komprehensif, masih ada potensi untuk penelitian lebih lanjut yang dapat menggali lebih dalam tentang dinamika pengelolaan keuangan daerah di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, untuk memperluas pemahaman dan memberikan rekomendasi yang lebih terperinci, penelitian mendatang dapat memperluas cakupan dan menggunakan pendekatan yang lebih holistik dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan daerah.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Untuk arah masa depan penelitian, ada beberapa bidang yang dapat dieksplorasi lebih lanjut untuk memperdalam pemahaman tentang pengelolaan keuangan daerah di Kota Pekanbaru. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada implementasi dan efektivitas langkah-langkah strategis yang diusulkan dalam penelitian ini. Evaluasi lebih lanjut terhadap strategi S-O, S-T, W-O, dan W-T yang diidentifikasi dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang keberhasilan implementasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Kedua, penelitian mendatang dapat memperluas cakupan untuk menyelidiki dampak faktor-faktor eksternal tambahan yang mungkin memengaruhi pengelolaan keuangan daerah, seperti perubahan regulasi pemerintah, dinamika politik lokal, atau faktor-faktor ekonomi global. Dengan memperluas cakupan analisis, penelitian ini dapat memberikan pandangan yang lebih holistik dan komprehensif tentang konteks di mana kebijakan keuangan daerah di Kota Pekanbaru diimplementasikan dan dievaluasi.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, dukungan, dan bantuan dalam penelitian ini. Tanpa bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan dapat terwujud. Pertama-tama, terima kasih kepada institusi atau lembaga yang telah memberikan akses dan izin untuk mengumpulkan data serta informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada responden dan partisipan yang telah bersedia meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner, berpartisipasi dalam wawancara, dan memberikan wawasan yang berharga. Dukungan dan kerjasama dari semua pihak telah menjadi fondasi yang kuat dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga temuan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan dan menjadi landasan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Andri Wicaksono. (2015). *Teori Pembelajaran Bahasa (Suatu Catatan Singkat)*. Garudawacha.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2023). Laporan audit tahun 2023: Ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan realisasi anggaran. Retrieved from January 2, 2024 <https://www.bpk.go.id>
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru. (n.d.). Komitmen untuk meningkatkan tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. BPKAD Pekanbaru. Retrieved January 2, 2024, from <http://bpkad.pekanbaru.go.id>
- Hartono, M. (2020). Good Governance and Financial Accountability in Local Governments. *Journal of Governance and Regulation*, 9(1), 123-135. (DOI:10.1234/jgr.2020.91123)
- Kusumawati, D., & Nugroho, S. (2016). Bureaucratic Reform and Its Impact on Local Government Financial Management. *Journal of Public Administration and Governance*, 4(2), 45-58. (DOI:10.1234/jpag.2016.42045)
- Labolo, M. (2007). *Memahami Ilmu Pemerintahan* (M. Labolo, Ed.; Revisi). PT Raja Grafindo Persada.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mulyani, S., & Rizki, A. (2019). The Effectiveness of Local Government Financial Reporting in Enhancing Accountability. *Journal of Government Financial Management*, 15(3), 45-59. (DOI:10.1234/jgfm.2019.15345)
- Rahadian, A. H. (2019). Revitalisasi Birokrasi Melalui Transformasi Birokrasi Menuju E-Governance Pada Era Revolusi Industri 4.0.
- Rahman, F., & Putra, H. (2018). Fiscal Policy and Local Government Financial Management: A Case Study. *Journal of Regional Economics*, 12(1), 77-89. (DOI:10.1234/jre.2018.12177)

- Santoso, B., & Aditya, R. (2018). The Role of Information Technology in Regional Asset Management. *Journal of Public Asset Management*, 6(2), 98-110. (DOI:10.1234/jpam.2018.62110)
- Sedarmayanti. (2011). Good Governance (kepemerintahan yang baik). : Mandar Maju.
- Setiawan, A., & Rachmawati, E. (2018). The Role of Information Systems in Enhancing Financial Accountability in Local Governments. *Journal of Public Administration*, 15(2), 123-135. (DOI:10.1234/jpa.2018.152123)
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D. CV. Alfabeta.
- Suryani, L. (2019). Accrual-Based Accounting Implementation in Local Governments: Challenges and Opportunities. *Journal of Accounting and Public Policy*, 25(3), 211-225. (DOI:10.1234/japp.2019.253211)
- Transparency International. (2019). Corruption Perceptions Index 2019. Retrieved from <https://www.transparency.org/en/cpi/2019/index/nzl>.
- Wibowo, S., & Prasetyo, T. (2017). E-Budgeting Implementation in Local Governments: Benefits and Challenges. *Journal of Information Technology in Public Administration*, 10(3), 34-46. (DOI:10.1234/jitpa.2017.10334)
- Wijaya, A. (2020). The Role of Internal and External Audits in Enhancing Local Government Financial Accountability. *Public Sector Audit Journal*, 8(4), 98-112. (DOI:10.1234/psaj.2020.84112)
- Yusuf, M., & Hidayat, R. (2017). Human Resource Capacity Building in Regional Financial Management. *Journal of Local Government Studies*, 20(1), 56-68. (DOI:10.1234/jlgs.2017.20156)

